



Article

Pendidikan yang Memerdekakan Persepektif Freire dan Ki Hajar Dewantara

Yusril Yusuf

Pojok Peradaban Institute, Malang; Indonesia; email : yusufyusril08@gmail.com

PERADABAN JOURNAL
OF INTERDISCIPLINARY
EDUCATIONAL RESEARCH
Vol. 2, Issue 2, Agustus 2024
ISSN 3025-2121

Page : 55-72

DOI: <https://doi.org/10.59001/pjier.v2i2.187>

[Copyright © The Author\(s\) 2023](#)



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution 4.0 International](#)
[License](#)

Abstract

Education plays a crucial role in determining a nation's progress, as it equips individuals with the skills, knowledge, and attitudes necessary to address global challenges through quality education. This paper explores the relationship between the quality of education and national development, as well as the negative impacts of low-quality education. Furthermore, this paper discusses Paulo Freire's perspective on education as a tool for liberation, emphasizing the importance of dialogical approaches, critical consciousness, and contextual relevance in the educational process. Freire's approach is proposed as a solution to address various challenges in Indonesia's education system, particularly regarding disparities in access and quality of education in remote and marginalized areas. Additionally, this paper evaluates the significance of revitalizing Ki Hajar Dewantara's educational principles in creating a more inclusive, relevant, and empowering education system. This research concludes that the implementation of more democratic and inclusive educational concepts can contribute significantly to positive social transformation in Indonesia.

Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Tulisan ini mengeksplorasi hubungan antara kualitas pendidikan dengan perkembangan suatu bangsa, serta dampak negatif yang timbul akibat rendahnya kualitas pendidikan. Selain itu, tulisan ini juga membahas pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai alat pembebasan, yang

menekankan pentingnya pendekatan dialogis, kesadaran kritis, dan relevansi kontekstual dalam proses pendidikan. Pendekatan Freire ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama terkait kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan terpinggirkan. Selanjutnya, tulisan ini juga mengevaluasi pentingnya revitalisasi prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan memberdayakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong transformasi sosial yang positif di Indonesia..

Keyword :

Pendidikan Indonesia, Paulo Freire, Ki Hajar Dewantara

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan krusial dalam menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Sebagai fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia, kualitas pendidikan mencerminkan seberapa siap suatu negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Kualitas pendidikan yang baik akan mendorong terbentuknya generasi yang mampu berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sedangkan pendidikan yang kurang berkualitas dapat menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan sosial (Alifah, 2021).

Namun, di Indonesia, tantangan dalam sektor pendidikan masih sangat nyata. Meskipun upaya untuk meningkatkan akses pendidikan terus dilakukan, kualitas pendidikan di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Kesenjangan ini tidak hanya terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tetapi juga antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda. Selain itu, masalah terkait kompetensi guru, relevansi kurikulum, dan minimnya fasilitas pendidikan turut memperburuk situasi ini (Kurniawati, 2022; Suparya et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, relevan, dan memberdayakan untuk mengatasi tantangan ini.

Dalam upaya mencari solusi untuk tantangan-tantangan tersebut, pemikiran Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara menawarkan perspektif yang relevan. Freire, dengan konsep pendidikan pembebasan dan kesadaran kritisnya, mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai proses yang dialogis dan kontekstual, di mana siswa berperan aktif dalam memahami dan mengubah realitas sosial mereka. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara melalui prinsip-prinsip pendidikan yang diusungnya – Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani – menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Tulisan ini akan membahas bagaimana konsep pendidikan Paulo Freire dapat diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia, serta relevansi dan revitalisasi prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis konsep-konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara serta penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Desain penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyusun, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini akan fokus pada literatur yang membahas teori pendidikan Paulo Freire, prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta implementasi keduanya dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, serta tesis dan disertasi. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, SpringerLink, dan lainnya. Kata kunci yang digunakan meliputi "Paulo Freire education", "Ki Hajar Dewantara principles", "education quality in Indonesia", dan lainnya. Proses ini melibatkan penelusuran literatur dari sumber-sumber yang diakui secara akademis dan relevan dengan topik penelitian.

Data dianalisis dengan memilih literatur yang relevan dan berkualitas tinggi berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi dengan topik penelitian, dan kontribusi teoretis. Kemudian mengelompokkan literatur berdasarkan tema, seperti konsep pendidikan Paulo Freire, prinsip Ki Hajar Dewantara, dan penerapan keduanya di Indonesia. Lalu menyusun dan menyintesis temuan dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, serta implikasi teoretis dan praktis dari penerapan konsep-konsep ini dalam pendidikan Indonesia. Terakhir menganalisis temuan dalam konteks teori pendidikan dan realitas di lapangan, serta membahas relevansi konsep-konsep ini terhadap tantangan dan peluang dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajah Pendidikan Indonesia Saat Ini

Pendidikan adalah suatu hal yang disepakati menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kualitas pendidikan dalam suatu bangsa menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa tersebut. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa atau negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan di bangsa dan negara tersebut. Buruknya kualitas pendidikan yang ada akan membuat bangsa atau negara tersebut mengalami ketertinggalan (Alifah, 2021).

Kemajuan suatu bangsa sering kali diukur dari kemampuan masyarakatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman, baik itu dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, maupun politik. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi kunci utama karena melalui pendidikan, individu memperoleh keterampilan,

pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Pendidikan yang berkualitas juga mendorong terciptanya masyarakat yang berpikir kritis, mampu berinovasi, dan adaptif terhadap perubahan. Sebaliknya, buruknya kualitas pendidikan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan suatu bangsa. Ketika pendidikan tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan, maka sumber daya manusia yang dihasilkan cenderung kurang kompeten dan tidak siap menghadapi tantangan global. Hal ini bisa menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai aspek, termasuk dalam penguasaan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi.

Negara yang memiliki kualitas pendidikan rendah sering kali juga mengalami berbagai masalah sosial, seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat literasi, dan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan juga dapat menghambat proses demokratisasi dan pembangunan sosial, karena masyarakat yang kurang terdidik cenderung lebih rentan terhadap manipulasi dan lebih sulit untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang penting (Fitri, 2021). Dengan demikian, investasi dalam peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi setiap bangsa yang ingin maju dan berkembang. Tanpa pendidikan yang berkualitas, bangsa akan sulit bersaing di panggung internasional dan berisiko terjebak dalam lingkaran ketertinggalan yang sulit untuk diatasi.

Kurniawati, (2022) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi situasi yang kompleks, di mana peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas yang memadai. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, seperti program wajib belajar 12 tahun dan pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), tantangan terkait kualitas pendidikan tetap menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi.

Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, siswa umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, seperti sekolah dengan infrastruktur yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, dan akses ke teknologi informasi. Sebaliknya, di daerah pedesaan, terutama di wilayah terpencil, akses terhadap pendidikan sering kali terbatas. Sekolah-sekolah di pedesaan mungkin kekurangan guru, fasilitas yang minim, dan jarak yang jauh antara tempat tinggal siswa dengan sekolah, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut (Ayuningtyas, 2021).

Ketimpangan ini juga mencerminkan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Siswa dari keluarga yang lebih mampu di perkotaan cenderung memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, termasuk bimbingan belajar tambahan dan sekolah swasta berkualitas tinggi, sementara siswa di pedesaan atau dari keluarga kurang mampu sering kali terpaksa menerima pendidikan dengan sumber daya yang terbatas.

Kompetensi guru menjadi salah satu faktor penentu utama kualitas pendidikan. Di Indonesia, masalah rendahnya kompetensi guru masih menjadi tantangan serius. Banyak guru di Indonesia yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai untuk mengajar dengan efektif. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan dukungan profesional untuk guru juga memperburuk

situasi ini. Guru yang kurang kompeten sering kali menghadapi kesulitan dalam menyampaikan materi pelajaran dengan baik, memahami kebutuhan siswa, dan mengadopsi metode pengajaran yang inovatif. Di samping itu, masalah distribusi guru juga menjadi kendala. Guru yang berkompoten cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara di daerah pedesaan atau terpencil, banyak sekolah yang kekurangan guru yang berkualitas. Hal ini semakin memperparah ketimpangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan (Suparya et al., 2022)

Kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali dikritik karena belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Nelda Sari Siregar et al., (2022) mengemukakan bahwa kurikulum yang ada cenderung lebih berfokus pada aspek kognitif dan akademik, dengan penekanan pada hafalan dan penilaian berbasis ujian, sementara keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital, sering kali kurang diperhatikan. Selain itu, kurikulum yang seragam di seluruh Indonesia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan “satu ukuran untuk semua” dalam kurikulum sering kali kurang efektif. Kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi dan kebutuhan lokal, sangat diperlukan untuk meningkatkan relevansi pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang memadai merupakan aspek penting dalam mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Sayangnya, di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, fasilitas pendidikan masih sangat minim. Banyak sekolah yang tidak memiliki bangunan yang layak, kekurangan buku dan bahan ajar, serta tidak memiliki akses terhadap teknologi yang memadai. Selain itu, kondisi laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya sering kali jauh dari standar yang ideal. Kurangnya fasilitas ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang dapat diberikan. Tanpa fasilitas yang memadai, guru dan siswa menghadapi keterbatasan dalam proses belajar mengajar, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa.

Pendidikan Pembebasan di Indonesia: Konsep Freire

Pemikiran Paulo Freire, seorang filsuf dan pendidik asal Brasil, memiliki pengaruh yang mendalam dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks masyarakat yang tertindas. Konsep-konsep Freire, seperti pendidikan sebagai alat pembebasan, pendekatan dialogis dalam pendidikan, kesadaran kritis, pendidikan untuk kaum tertindas, dan pendidikan kontekstual, menawarkan pandangan kritis yang relevan jika diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Penerapan konsep-konsep ini dapat membantu mengubah pendekatan pendidikan di Indonesia menjadi lebih inklusif, relevan, dan memberdayakan, yang pada akhirnya dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

1. Pendidikan dari Sudut Pandang Freire

Dalam bukunya *Pendidikan yang Membebaskan*, Freire (1985) melihat pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi sebagai alat untuk pembebasan. Menurutnya, pendidikan harus memungkinkan individu untuk menjadi subjek aktif dalam hidup mereka, mampu berpikir kritis dan memahami realitas sosial mereka. Freire mengusulkan paradigma yang berbeda, di mana pendidikan harus membebaskan daripada menindas.

Ini berarti pendidikan harus mendorong siswa untuk memahami realitas sosial mereka secara kritis, menyadari ketidakadilan yang ada, dan berpartisipasi aktif dalam transformasi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, menerapkan pemikiran Freire ini dapat mengubah pendekatan pendidikan dari yang hanya berfokus pada pengajaran materi ajar, menjadi sebuah proses yang lebih holistik yang mengembangkan kesadaran sosial dan kemandirian berpikir siswa. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai proses yang linear dan statis, tetapi sebagai ruang di mana siswa belajar untuk mengidentifikasi, memahami, dan bertindak atas masalah-masalah sosial yang mereka hadapi.

Di Indonesia, sistem pendidikan masih sering kali didominasi oleh pendekatan *top-down* yang memposisikan guru sebagai otoritas utama dan satu-satunya sumber pengetahuan. Dalam model ini, proses pembelajaran cenderung bersifat satu arah, di mana guru menyampaikan informasi dan siswa diharapkan menerima dan menghafal apa yang diajarkan tanpa banyak kesempatan untuk mempertanyakan atau mendiskusikan materi tersebut. Pendekatan ini umumnya memandang siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan pengetahuan, dan bukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran.

Pendekatan *top-down* ini memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat penilaian yang independen berdasarkan bukti yang tersedia. Namun, jika pendidikan hanya berfokus pada penghafalan dan penerimaan informasi tanpa mempertanyakan, siswa tidak diberi ruang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis ini. Mereka terbiasa menerima apa yang diajarkan sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertanyakan asal-usul atau implikasinya. Akibatnya, siswa mungkin kesulitan dalam menganalisis situasi yang kompleks atau mengambil keputusan yang memerlukan penilaian kritis.

Dalam konteks sosial, hal ini juga berarti bahwa siswa mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mampu mengkritisi kondisi sosial yang mereka alami. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengenali ketidakadilan atau masalah sosial yang ada di sekitar mereka, atau merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan tersebut. Dengan demikian, pendidikan yang didominasi oleh pendekatan *top-down* dapat memperkuat status quo dan menghambat perkembangan individu yang mandiri dan berpikir kritis. Pendekatan *top-down* juga cenderung mengurangi partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam banyak kasus, siswa hanya berperan sebagai penerima informasi yang disampaikan oleh guru, tanpa diberi kesempatan untuk berkontribusi atau berbagi pandangan mereka. Padahal, partisipasi aktif sangat penting dalam proses pembelajaran, karena memungkinkan siswa untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka sendiri, menguji pemahaman mereka, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta komunikasi.

Ketika siswa tidak dilibatkan secara aktif, mereka cenderung menjadi pasif dan kurang termotivasi. Mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak dihargai atau tidak relevan, yang dapat menyebabkan penurunan minat terhadap pembelajaran. Di sisi lain, partisipasi aktif dapat mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan membantu siswa membangun koneksi yang lebih kuat antara apa yang mereka pelajari di kelas dan dunia nyata di sekitar mereka.

Freire juga percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan konteks kehidupan siswa. Artinya, kurikulum harus mencerminkan realitas sosial, budaya, dan ekonomi siswa. Di Indonesia, kurikulum nasional sering kali tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi lokal di berbagai daerah. Pendidikan yang terlalu seragam cenderung mengabaikan kebutuhan dan realitas siswa yang beragam, baik dari segi budaya, bahasa, maupun kondisi ekonomi. Pendekatan Freire mendorong pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini bisa melibatkan integrasi aspek-aspek budaya lokal, bahasa daerah, dan kondisi ekonomi setempat ke dalam kurikulum, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang dunia luar, tetapi juga memahami dan menghargai konteks lokal mereka sendiri.

2. Pendidikan untuk Kaum Tertindas

Pendidikan untuk kaum tertindas, sebagaimana dipaparkan oleh Paulo Freire dalam karyanya yang terkenal "*Pedagogy of the Oppressed*", adalah sebuah pendekatan yang radikal terhadap pendidikan yang dirancang untuk memberdayakan dan membebaskan mereka yang berada dalam posisi marginal atau tertindas dalam masyarakat. Pandangan Freire ini lahir dari pengamatannya terhadap ketidakadilan sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan, terutama di Brasil, tempat ia berasal, tetapi relevan juga di berbagai konteks global.

Freire (2000) mengkritik model pendidikan tradisional yang disebutnya sebagai "*banking education*" atau pendidikan gaya bank. Dalam model ini, pendidikan dipandang sebagai proses di mana guru adalah pemberi pengetahuan dan siswa adalah penerima pasif. Siswa dianggap sebagai tabungan kosong yang harus diisi dengan informasi oleh guru, tanpa adanya interaksi kritis atau keterlibatan aktif dari siswa. Freire melihat model ini sebagai alat penindasan karena tidak memberi ruang bagi siswa untuk mempertanyakan, mengkritisi, atau memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang bermakna. Pendidikan gaya bank, menurut Freire, memperkuat struktur kekuasaan yang ada dan melanggengkan status quo, di mana kaum tertindas tetap berada dalam keadaan ketertindasan mereka.

Sebagai alternatif, Freire memperkenalkan konsep "*conscientization*" atau penyadaran kritis. Penyadaran kritis adalah proses di mana individu, khususnya kaum tertindas, menjadi sadar akan situasi sosial, politik, dan ekonominya, serta memahami struktur kekuasaan yang menindas mereka. Pendidikan, dalam pandangan Freire, harus menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran ini, sehingga mereka yang tertindas dapat melihat realitas mereka secara kritis dan kemudian mengambil tindakan untuk mengubahnya. Freire menekankan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan kolaboratif. Dalam pendidikan yang dialogis, guru dan siswa bukanlah pihak yang terpisah, tetapi mitra dalam proses belajar-mengajar. Guru tidak lagi hanya menjadi pemberi pengetahuan, melainkan fasilitator yang membantu siswa untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide, dan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata mereka. Siswa, di sisi lain, tidak lagi dipandang sebagai penerima pasif, tetapi sebagai individu yang aktif dan kritis, yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran. Proses dialogis ini mendorong siswa untuk tidak hanya memahami pengetahuan secara intelektual, tetapi juga merasakannya dan menghubungkannya dengan konteks sosial mereka.

Freire juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata para peserta didik. Ia percaya bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman konkret siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang tertindas. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh menjadi proses yang terpisah dari realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh siswa. Sebaliknya, pendidikan harus membantu siswa untuk memahami dan mengkritisi kondisi kehidupan mereka, serta membekali mereka dengan alat-alat untuk mengubah keadaan tersebut. Misalnya, jika siswa adalah petani miskin, pendidikan yang mereka terima harus mencakup pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai petani, teknik pertanian yang lebih baik, serta bagaimana mereka dapat berorganisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Pongoh et al., 2022).

Pendidikan untuk kaum tertindas juga menuntut perubahan dalam cara kita melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Freire menegaskan bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi selalu terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan harus berfungsi untuk mendekonstruksi pengetahuan yang menindas dan menggantinya dengan pengetahuan yang memberdayakan. Ini berarti bahwa kurikulum dan metode pengajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok dominan, tetapi juga memberikan suara kepada mereka yang selama ini dibungkam. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat pembebasan, yang memungkinkan kaum tertindas untuk mengembangkan kesadaran kritis, mengambil tindakan kolektif, dan akhirnya membebaskan diri mereka dari ketertindasan. Pendidikan yang membebaskan ini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang transformasi sosial. Freire percaya bahwa melalui pendidikan yang membebaskan, kaum tertindas dapat mencapai "*praxis*"—sebuah siklus refleksi dan tindakan—yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mengubahnya.

Freire menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk memberdayakan kaum tertindas, bukan untuk melestarikan status quo yang menindas. Dalam konteks Indonesia, di mana masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan komunitas yang kurang beruntung, pandangan Freire ini sangat relevan. Pendidikan sering kali menjadi alat untuk mempertahankan hierarki sosial, di mana mereka yang sudah memiliki akses dan kekuatan cenderung mempertahankan posisi mereka, sementara yang tertindas tetap tertinggal.

Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan akses dan kualitas. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil dan terpinggirkan. Banyak anak di daerah-daerah ini masih kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak karena keterbatasan infrastruktur, ketersediaan guru, dan sumber daya pendidikan lainnya. Mengadopsi pandangan Freire dapat mendorong kebijakan yang lebih proaktif dalam memperluas akses pendidikan di daerah-daerah ini. Misalnya, pemerintah dapat fokus pada pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, pengadaan transportasi yang memadai bagi siswa, serta penyediaan teknologi yang memungkinkan pendidikan jarak jauh. Dengan demikian, setiap anak, di manapun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas (Ajat & Hambali, 2021).

Selain masalah akses, penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai juga menjadi isu penting. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan besar dalam hal fasilitas dan sumber daya pendidikan antara sekolah-sekolah di perkotaan dengan di pedesaan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, peralatan laboratorium, dan akses ke teknologi informasi. Dengan mengadopsi pendekatan Freire, kebijakan pendidikan harus berfokus pada penyediaan sumber daya yang memadai bagi semua sekolah, tanpa memandang lokasi atau latar belakang sosial ekonomi siswa. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswa mereka. Ini termasuk alokasi anggaran yang adil, bantuan teknis, serta program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru.

Lebih lanjut, pandangan Freire juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Di Indonesia, siswa dari keluarga miskin sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan yang layak. Hambatan ini bisa berupa biaya sekolah yang tinggi, kurangnya dukungan keluarga, atau kebutuhan untuk bekerja sejak usia dini demi membantu perekonomian keluarga. Kebijakan pendidikan yang inklusif harus mencakup program beasiswa, subsidi pendidikan, dan dukungan sosial bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kebijakan juga perlu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan Freire, pendidikan bukanlah proses satu arah di mana guru memberikan pengetahuan kepada siswa secara pasif. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi dialog dua arah, di mana siswa juga dilibatkan dalam proses berpikir kritis dan refleksi atas realitas sosial mereka.

Dengan mengadopsi pandangan Freire, pendidikan di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Freire akan menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalam proses pendidikan, pengakuan terhadap keberagaman, serta komitmen untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua anak bangsa. Pada akhirnya, pendidikan yang memberdayakan dan inklusif akan menjadi kunci untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan sosial.

Penerapan pemikiran Paulo Freire dalam pendidikan di Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan memberdayakan. Dengan mengadopsi pendekatan pendidikan yang membebaskan, dialogis, kritis, dan kontekstual, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sektor pendidikan dan menciptakan generasi yang siap untuk berperan aktif dalam transformasi sosial yang positif. Secara keseluruhan, pemikiran Paulo Freire mengajak kita untuk memikirkan kembali peran pendidikan di Indonesia sebagai alat transformasi sosial yang lebih demokratis dan memberdayakan.

Revitalisasi Prinsip Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pemikiran yang mendalam dan berpengaruh tentang pendidikan. Filosofi pendidikannya tercermin dalam semboyannya yang terkenal: *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*.

1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Ing Ngarsa Sung Tuladha, yang berarti “di depan memberi contoh,” adalah salah satu prinsip utama dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip ini menekankan bahwa guru atau pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya, tidak hanya dalam konteks akademis, tetapi juga dalam perilaku, moralitas, dan etika. Guru sebagai teladan berarti mereka harus menunjukkan sikap, tindakan, dan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan pada para siswa. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, yang dimulai dengan contoh nyata dari para pendidik. Peran guru sebagai teladan ini sangat penting karena anak-anak cenderung meniru dan belajar dari apa yang mereka lihat. Sebagai individu yang berada di depan, guru diharapkan mampu memperlihatkan sikap dan perilaku yang pantas dijadikan contoh. Misalnya, jika seorang guru ingin menanamkan nilai kejujuran kepada murid-muridnya, maka guru tersebut harus selalu bersikap jujur dalam setiap tindakan dan ucapannya. Jika seorang guru ingin mengajarkan kedisiplinan, maka ia harus menunjukkan kedisiplinan dalam hal waktu, tugas, dan tanggung jawab (Ardini et al., 2023).

Romario et al., (2023) menyatakan selain perilaku, guru juga harus menjadi contoh dalam hal pengetahuan dan kompetensi. Guru yang baik adalah mereka yang terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga dapat memberikan ilmu yang selalu relevan dan *up-to-date* kepada murid-muridnya. Mereka harus menunjukkan semangat belajar yang tinggi, yang pada gilirannya akan menginspirasi murid-murid untuk mengikuti jejak mereka. Dalam hal ini, guru bukan hanya sebagai pemberi materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing yang membangun semangat belajar sepanjang hayat. Lebih jauh lagi, peran guru sebagai teladan juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Guru harus mampu menunjukkan empati, kesabaran, dan kasih sayang kepada setiap murid. Ini berarti memahami kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh siswa, serta memberikan dukungan yang sesuai untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Sikap positif ini akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar.

Di dunia pendidikan saat ini, prinsip **Ing Ngarsa Sung Tuladha** tetap relevan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana para pendidik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di era digital, di mana informasi mudah diakses dan teknologi semakin dominan, guru masih perlu menunjukkan kepemimpinan moral dan intelektual yang dapat diandalkan. Dengan menjadi teladan yang baik, guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter generasi masa depan yang berintegritas dan berkompeten.

Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti “di tengah memberi semangat,” adalah salah satu prinsip sentral dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara

yang menekankan peran guru sebagai pendamping dan motivator dalam proses pembelajaran. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa guru harus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, bukan sebagai otoritas yang mendikte, melainkan sebagai mitra yang mendorong dan menginspirasi mereka untuk berkembang. Hal ini mengubah pandangan tradisional tentang peran guru yang sering kali dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, menjadi lebih dinamis dan interaktif, di mana guru dan siswa berkolaborasi dalam pencarian ilmu.

Sebagai pendamping, guru berada di antara siswa, mendukung mereka dalam setiap langkah proses belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendengarkan kebutuhan dan keinginan siswa, serta memahami tantangan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Setiap siswa adalah unik, dengan cara belajar yang berbeda, dan peran guru adalah mengidentifikasi dan memfasilitasi pendekatan yang paling efektif untuk setiap siswa (Nurhalita & Hudaidah, 2021).

Guru yang menerapkan prinsip *Ing Madya Mangun Karsa* juga harus peka terhadap perkembangan emosi dan psikologi siswa. Di sini, guru bukan hanya seorang pengajar tetapi juga seorang pembimbing yang membantu siswa mengatasi rasa takut, kecemasan, atau rasa tidak percaya diri yang mungkin menghambat proses belajar mereka. Dengan memberikan dukungan emosional, guru dapat membantu siswa menemukan kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri. Kehadiran guru di tengah-tengah siswa juga penting untuk menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi ide, dan belajar dari satu sama lain. Dengan demikian, kelas menjadi ruang di mana setiap siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Ini penting dalam membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif di antara siswa (Putri, 2019).

Prinsip ini juga mengandung gagasan bahwa guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Alih-alih memberikan jawaban langsung, guru seharusnya mendorong siswa untuk menemukan jawaban mereka sendiri melalui refleksi, diskusi, dan eksplorasi. Ini melibatkan pemberian tantangan yang mendorong siswa untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Selain itu, guru yang mengamalkan *Ing Madya Mangun Karsa* harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran tidak harus selalu bersifat serius dan kaku; dengan kreativitas, guru dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan bagi kehidupan siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti proyek kelompok, permainan edukatif, atau pembelajaran berbasis proyek, dapat membantu mempertahankan minat dan semangat siswa dalam belajar.

Febriyanti (2020) mengemukakan guru juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan terus-menerus kepada siswa. Umpan balik ini harus bersifat mendukung dan mendorong, bukan menghakimi atau menekan. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberi mereka panduan tentang cara memperbaiki dan mengembangkan diri. Dengan cara ini, siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Di era teknologi dan informasi saat ini, prinsip *Ing Madya Mangun Karsa* juga

relevan dalam konteks pembelajaran digital. Guru harus berperan sebagai pemandu yang membantu siswa menavigasi lautan informasi yang tersedia secara online. Dengan membimbing siswa untuk memilih dan menggunakan sumber informasi yang kredibel, serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, guru dapat mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, prinsip ini menekankan pentingnya hubungan yang hangat dan suportif antara guru dan siswa. Guru yang menerapkan *Ing Madya Mangun Karsa* harus menciptakan ikatan yang kuat dengan siswa, di mana siswa merasa nyaman untuk mengungkapkan ide, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Hubungan yang baik ini menjadi fondasi bagi pencapaian akademik dan perkembangan karakter siswa.

Secara keseluruhan, *Ing Madya Mangun Karsa* mencerminkan pendekatan pendidikan yang humanistik, di mana guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang berada di tengah-tengah siswa. Dengan menerapkan prinsip ini, guru dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana siswa merasa didukung untuk berkembang baik secara akademis maupun pribadi, serta siap menghadapi tantangan di dunia nyata.

Tut Wuri Handayani, yang berarti “di belakang memberi dorongan,” adalah prinsip ketiga dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan peran guru ketika murid sudah mencapai tahap di mana mereka mampu berdiri sendiri. Prinsip ini menggambarkan peran guru sebagai pendukung yang berada di belakang siswa, memberikan dorongan dan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Pada tahap ini, peran guru tidak lagi sebagai pemimpin di depan atau pendamping di tengah, tetapi sebagai pendorong yang memastikan bahwa siswa memiliki ruang untuk tumbuh dan belajar secara mandiri.

Ketika siswa telah mencapai kematangan tertentu dalam pembelajaran mereka, guru perlu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengambil alih kendali atas proses belajar mereka sendiri. Ini adalah momen penting dalam perkembangan siswa, di mana mereka belajar untuk mengandalkan kemampuan mereka sendiri, membuat keputusan, dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan tanpa merasa terlalu diawasi. Guru, dalam hal ini, harus memahami kapan saat yang tepat untuk melangkah mundur dan memberi siswa kesempatan untuk mencoba dan bahkan gagal, karena dari kegagalan itulah pembelajaran yang mendalam sering kali terjadi.

Memberikan kebebasan kepada siswa juga berarti mempercayai mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Dalam banyak kasus, siswa akan menemukan bahwa mereka memiliki minat atau kemampuan yang unik ketika mereka diberikan kebebasan untuk mengejar apa yang mereka sukai. Guru yang menerapkan prinsip *Tut Wuri Handayani* akan mendukung eksplorasi ini dengan menyediakan sumber daya, bimbingan minimal, dan dorongan moral, tanpa terlalu banyak campur tangan dalam prosesnya. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan berpikir di luar batasan yang biasa mereka temui dalam pembelajaran konvensional. Namun, penting bagi guru untuk tetap waspada dan siap memberikan bantuan ketika diperlukan. Meskipun prinsip ini menekankan pada dorongan dari belakang, guru harus tetap tersedia untuk membantu siswa jika mereka menghadapi kesulitan yang tidak dapat mereka atasi sendiri. Guru harus menjadi pendukung yang bijaksana, yang tahu kapan harus mendorong siswa untuk

maju dan kapan harus menawarkan tangan bantuan. Ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan bimbingan, yang sangat penting dalam memastikan bahwa siswa tidak merasa terabaikan atau terlalu ditinggalkan.

Prinsip Tut Wuri Handayani juga relevan dalam konteks pendidikan karakter. Dengan memberi dorongan dari belakang, guru membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian yang kuat. Siswa belajar bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan dan keputusan mereka sendiri, yang penting untuk perkembangan pribadi mereka di luar lingkungan sekolah. Mereka diajarkan untuk tidak selalu bergantung pada orang lain dan menjadi individu yang bertanggung jawab dan proaktif dalam menghadapi tantangan hidup (Zainullah et al., 2022).

Pada akhirnya, Tut Wuri Handayani mengajarkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah membentuk individu yang mandiri, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Guru berperan sebagai pendorong yang dengan penuh kepercayaan memberikan ruang kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Dengan memberikan dorongan dari belakang, guru membantu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga tangguh, mandiri, dan siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan dengan percaya diri

2. Menyegarkan Prinsip-prinsip Pendidikan Ki Hajar Dewantara di Indonesia

Pendidikan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pandangan dan filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama dalam hal pendekatan pendidikan yang humanis dan berpusat pada siswa. Semboyan *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani* menjadi pedoman yang diakui secara luas dalam sistem pendidikan nasional. Banyak sekolah, baik negeri maupun swasta, berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini dalam proses belajar mengajar mereka. Namun, penerapan penuh dari filosofi ini menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan.

Peningkatan kualitas pengajaran di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, di mana guru diharapkan menjadi teladan yang baik bagi siswa. Namun, di banyak daerah, kualitas pengajaran masih bervariasi, terutama karena kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Banyak guru, terutama di wilayah terpencil, belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan lanjutan atau pelatihan yang relevan, yang membuat mereka kesulitan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan metode pengajaran modern (Sari et al., 2023).

Prinsip *Ing Ngarsa Sung Tuladha* menempatkan guru sebagai sosok yang harus memberi contoh dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku. Agar bisa menjalankan peran ini secara efektif, guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam serta kemampuan pedagogis yang kuat. Namun, dengan adanya keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan, banyak guru yang belum sepenuhnya siap untuk menjadi teladan di dalam dan di luar kelas. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara harapan ideal terhadap peran guru dan kenyataan di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, program pengembangan profesional bagi guru menjadi sangat penting. Program ini harus mencakup pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan pedagogis dan kepemimpinan.

Pengembangan profesional yang efektif memungkinkan guru untuk terus memperbarui pengetahuan mereka, mengadopsi teknik pengajaran yang lebih baik, dan menjadi lebih inspiratif bagi siswa. Hal ini juga memberikan guru kemampuan untuk menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang di era digital.

Pribadi et al., (2024) berpendapat bahwa selain pelatihan konvensional, inovasi dalam pendidikan guru juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Penggunaan teknologi dalam pelatihan, seperti e-learning dan kursus online, dapat membantu menjangkau lebih banyak guru di berbagai daerah. Selain itu, pembelajaran kolaboratif antar guru, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik, juga penting untuk menciptakan komunitas guru yang lebih kompeten dan saling mendukung. Dengan demikian, kualitas pengajaran dapat meningkat secara keseluruhan, dan guru dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka sebagai teladan.

Peningkatan kualitas guru melalui pengembangan profesional dan inovasi dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada guru itu sendiri, tetapi juga secara langsung pada siswa. Guru yang lebih kompeten dan inspiratif akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif, di mana siswa merasa termotivasi dan didorong untuk belajar. Ketika guru benar-benar mampu menjadi teladan, mereka tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai penting seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras, yang semuanya sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengajaran akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan yang lebih holistik sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara.

Prinsip *Ing Madya Mangun Karsa* menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang partisipatif, di mana guru dan siswa bekerja sama dalam proses belajar. Idealnya, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga berperan aktif dalam diskusi, bertanya, dan berkontribusi dalam menemukan solusi. Namun, di banyak sekolah di Indonesia, pendekatan pembelajaran yang dominan masih bersifat satu arah. Guru sering kali menjadi pusat utama dalam kelas, menyampaikan materi secara monolog sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat, tanpa banyak ruang untuk partisipasi aktif.

Beberapa faktor berkontribusi pada dominasi metode pengajaran satu arah ini. Salah satunya adalah kurikulum yang padat dan berbasis ujian, yang mendorong guru untuk fokus pada penyelesaian materi sesuai jadwal tanpa memperhatikan proses belajar yang lebih interaktif. Selain itu, kelas yang sering kali berukuran besar juga menjadi tantangan, karena sulit bagi guru untuk mengelola diskusi atau aktivitas kolaboratif di kelas dengan banyak siswa. Ditambah lagi, keterbatasan dalam pelatihan guru terkait metode pembelajaran partisipatif membuat banyak guru lebih nyaman menggunakan metode tradisional yang lebih sederhana untuk dijalankan (Marce & Purbonuswanto, 2019).

Pendekatan pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru dapat membatasi perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Siswa menjadi terbiasa menerima informasi tanpa dipandu untuk menganalisis, mempertanyakan, atau mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Hal ini dapat menghambat pembentukan keterampilan yang penting untuk kehidupan di luar sekolah, seperti kemampuan bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah, dan berinovasi. Selain itu,

siswa mungkin merasa kurang terlibat dalam proses belajar, yang dapat mengurangi motivasi dan minat mereka terhadap pelajaran.

Untuk mengatasi tantangan ini, transformasi dalam metode pengajaran sangat diperlukan. Guru perlu didorong dan dilatih untuk mengadopsi pendekatan yang lebih interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi pendidikan yang memungkinkan partisipasi aktif siswa. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan melibatkan siswa secara aktif, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga membantu siswa menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Prinsip *Tut Wuri Handayani* yang berarti “di belakang memberi dorongan” sangat relevan dengan konsep Merdeka Belajar yang saat ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dengan otonomi yang lebih besar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, siswa diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada bidang yang mereka kuasai dan sukai. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan.

Ruth et al., (2023) mengatakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar telah memperkenalkan lebih banyak kebebasan dan otonomi bagi siswa dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Siswa sekarang dapat lebih bebas menentukan jalur pendidikan mereka sendiri, baik melalui pilihan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun proyek-proyek mandiri. Pendekatan ini mendukung siswa untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Selain itu, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dan bimbingan ketika diperlukan, sesuai dengan prinsip *Tut Wuri Handayani*.

Namun, penerapan prinsip *Tut Wuri Handayani* dalam konteks Merdeka Belajar masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kebebasan belajar siswa. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, atau akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk eksplorasi dan pembelajaran mandiri. Selain itu, keterbatasan dalam jumlah guru yang terlatih untuk menerapkan metode pembelajaran yang mendukung otonomi siswa juga menjadi hambatan, sehingga banyak siswa mungkin belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kebebasan belajar yang diberikan oleh kurikulum ini.

Agar konsep Merdeka Belajar dan prinsip *Tut Wuri Handayani* dapat diterapkan secara optimal, perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan pihak terkait dalam menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Investasi dalam teknologi pendidikan, pelatihan guru, serta pengembangan fasilitas sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari lokasi dan latar belakang mereka, dapat merasakan manfaat dari pendekatan ini. Dengan dukungan yang tepat, Merdeka Belajar dapat menjadi langkah maju yang signifikan

dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara untuk membentuk generasi yang mandiri, kreatif, dan inovatif (Marce & Purbonuswanto, 2019).

Secara keseluruhan, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memberikan fondasi yang kuat untuk sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, penerapan sepenuhnya dari filosofinya masih membutuhkan peningkatan dalam kualitas guru, metode pengajaran yang lebih dinamis, serta dukungan penuh terhadap kebebasan belajar bagi siswa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, meskipun telah ada banyak upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Tantangan utama yang dihadapi termasuk ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang kurang relevan, dan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan individu tetapi juga pada daya saing nasional dan kualitas sumber daya manusia.

Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan menawarkan pendekatan alternatif yang dapat memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Dengan mengadopsi konsep-konsep seperti pendidikan dialogis, kesadaran kritis, dan pendidikan kontekstual, pendidikan dapat menjadi alat untuk memberdayakan siswa agar lebih sadar akan ketidakadilan sosial dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Ini menekankan perlunya pendidikan yang lebih dialogis, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial siswa.

Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan prinsip-prinsipnya Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani, tetap relevan dalam konteks pendidikan modern di Indonesia. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya guru sebagai teladan, motivator, dan pendukung dalam proses pembelajaran. Meskipun ada banyak tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, seperti kurangnya pelatihan guru yang memadai dan dominasi metode pengajaran satu arah, revitalisasi prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan partisipatif.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan bagi guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan memberdayakan, mencetak individu yang kompeten, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat, A. S., & Hambali, R. Y. A. (2021). Analisis Filsafat Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.107>
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Mengejar Ketertinggalan Dari Negara Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113.

- https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.968
- Ardini, A. N., Ulfah, D. K. Al, & Setiawati, D. (2023). PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA TENTANG PENDIDIKAN INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 176–183. <https://doi.org/10.24114/ph.v8i2.46819>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Febriyanti, N. (2020). Implementasi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(01), 96. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2306>
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617–1620.
- Freire, P. (1985). Pendidikan yang Membebaskan. In *The Journal of Higher Education* (Vol. 56, Issue 5, p. 584). <https://doi.org/10.2307/1981218>
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Marce, T. D., & Purbonuswanto, W. (2019). Implementasi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dalam Manajemen Pembelajaran Praktik. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 146. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3712>
- Nelda Sari Siregar, Alfin Julianto, & Arif Ismunandar. (2022). Dampak Perubahan Kurikulum terhadap Buku Paket Bahasa Indonesia sebagai Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.69775/jpia.v3i1.89>
- Nurhalita, N., & Hudaidah, H. (2021). Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara pada Abad ke 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 298–303. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.299>
- Pongoh, D., Lumapow, H. R., Lengkong, J. S. J., Rotty, V. N. J., & Tuerah, I. J. C. (2022). Sumbangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Paulo Freire Bagi Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia. *Media (Jurnal Filsafat Dan Teologi)*, 3(1), 103–115. <https://doi.org/10.53396/media.v3i1.57>
- Pribadi, R. A., Mutakarikah, M., Putra I., A. F., & Nurhazizah, N. (2024). Implementasi Konsep Ing Ngarso Sung Talado, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani Dalam Perspektif Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 10(1), 60. <https://doi.org/10.33394/jtni.v10i1.9981>
- Putri, V. A. R. & A. (2019). Pemikiran ki hadjar dewantara tentang pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(6), 1514–1519.
- Romario, A. W., Saputra, A., & Nasution, B. (2023). Ki Hajar Dewantara dan Pendidikan di Indonesia. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 1(1), 52–60. https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v1i1.753
- Ruth, B., Novia, R., & Surhayati, H. (2023). Perspektif Semboyan Pendidikan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani Dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3674–3678. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.23009>

- Sari, P., Sabatini, S., Darwin, & Sinaga, O. (2023). Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani: nilai kepemimpinan etnik jawa dan relevansinya dengan trend perkembangan masa depan organisasi pendidikan. *GENTA MULIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(2), 380-388.
- Suparya, I. K., I Wayan Suastra, & Putu Arnyana, I. B. (2022). Rendahnya Literasi Sains: Faktor Penyebab Dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(1), 153-166. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v9i1.580>
- Zainullah, Simanjuntak, N. M., Huda, N., & Said, A. (2022). Implementasi Falsafah Tut Wuri Handayani pada Kurikulum Sekolah. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 45-60.